



DFSA **SADAR HUKUM**

MUHAMMAD NAJIH VARGHOLY

RABU, 8 NOVEMBER 2023 – ASTON HOTEL, BATU

DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPALA DESA - BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023



Introduce **ABOUT ME**

- Dosen Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
- Peneliti Pusat Pengembangan
Otonomi Daerah (PPOTODA)
- Fasilitator “Sekolah Keadilan” &
“Sekolah Riset Pengembangan”



**MUHAMMAD
NAJIH
VARGHOLY**

WA
08990476407



Table of **CONTENT**

KESADARAN HUKUM

DESA SADAR HUKUM

MEDIATOR

STUDI KASUS

DISKUSI KELOMPOK

TANYA JAWAB



Apa itu **KESADARAN HUKUM?**

Kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada **aturan-aturan atau hukum yang berlaku**. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar **ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan** dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

Desa SADAR HUKUM

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, **memenuhi kriteria** sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.



**Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
(DSH/KSH)**

INFORMASI HUKUM

Akses

IMPLEMENTASI HUKUM

Akses

KEADILAN

Akses

DEMOKRASI & REGULASI

Akses



Dimensi
DESA SADAR HUKUM

Parameter

AKSES INFORMASI HUKUM

- **KADARKUM**

Berapa jumlah kelompok Kadarkum yang telah terbentuk?

- **PARALEGAL**

Berapa jumlah Paralegal di tiap Desa/Kelurahan yang telah terbentuk dan bersertifikasi?

- **MEDIA INFORMASI TERINTEGRASI DENGAN JDIHN**

Apakah ada Layanan JDIH yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi?

- **KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM**

Berapa jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir?

Apakah dalam kegiatan Penyuluhan Hukum melibatkan tenaga fungsional Penyuluh Hukum?

- **MEDIA INFORMASI PENYULUHAN HUKUM**

Berapa jenis bentuk media informasi penyuluhan hukum yang terdapat di tiap Desa/Kelurahan?

Parameter **AKSES IMPLEMENTASI HUKUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Desa/Kelurahan Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

**APAKAH ADA DATA KASUS
MINIMAL 1 (SATU) TAHUN
TERAKHIR?**

**PRESENTASE
PENYELESAIAN KASUS
YANG TERJADI**

**PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
MEWUJUDKAN
TERCIPTANYA KEAMANAN,
KETERTIBAN, KESEHATAN
DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

Parameter AKSES KEADILAN

Ketersediaan Akses Keadilan dan
Penyelesaian Sengketa di Luar Proses
Hukum



**BERAPA JENIS BENTUK
KETERSEDIAAN AKSES
KEADILAN YANG TERDAPAT DI
TIAP DESA/KELURAHAN?**



**APAKAH ADA LEMBAGA ADAT
ATAU PEMUKA MASYARAKAT
YANG BERPERAN
MENYELESAIKAN SENGKETA
ANTAR WARGA MASYARAKAT DI
DESA/ KELURAHAN DILUAR
PIHAK BERWAJIB (POLISI)?**

Parameter AKSES DEMOKRASI & REGULASI

Proses demokrasi dalam pembentukan regulasi dan tata kelola pemerintahan di desa/kelurahan dengan didukung nilai-nilai kearifan lokal



**BERAPA JUMLAH ATURAN DI
DESA/KELURAHAN TERKAIT
DENGAN PROGRAM
PENINGKATAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT**



**PARTISIPASI APARAT
DESA/KELURAHAN DAN
MASYARAKAT DALAM
MENJALANKAN PROGRAM
PEMERINTAH DESA**



**APAKAH DESA/KELURAHAN
MEMBERIKAN FASILITAS
KEPADA MASYARAKAT UNTUK
MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA
TERKAIT PENYUSUNAN
REGULASI**

Instructions

Go to

www.menti.com

Enter the code

5803 7833



Or use QR code



Apa itu **MEDIASI?**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui **proses perundingan** untuk **memperoleh kesepakatan Para Pihak** dengan dibantu oleh **Mediator**.

Siapaakah MEDIATOR?

Mediator adalah **pihak netral** yang **membantu** para pihak dalam proses perundingan guna **mencari berbagai kemungkinan** penyelesaian sengketa **tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan** sebuah penyelesaian.




Tipologi MEDIATOR


Berdasarkan relasi antara mediator dan para pihak yang bersengketa, terdapat 3 tipe mediator:



**SOCIAL NETWORK
MEDIATOR**



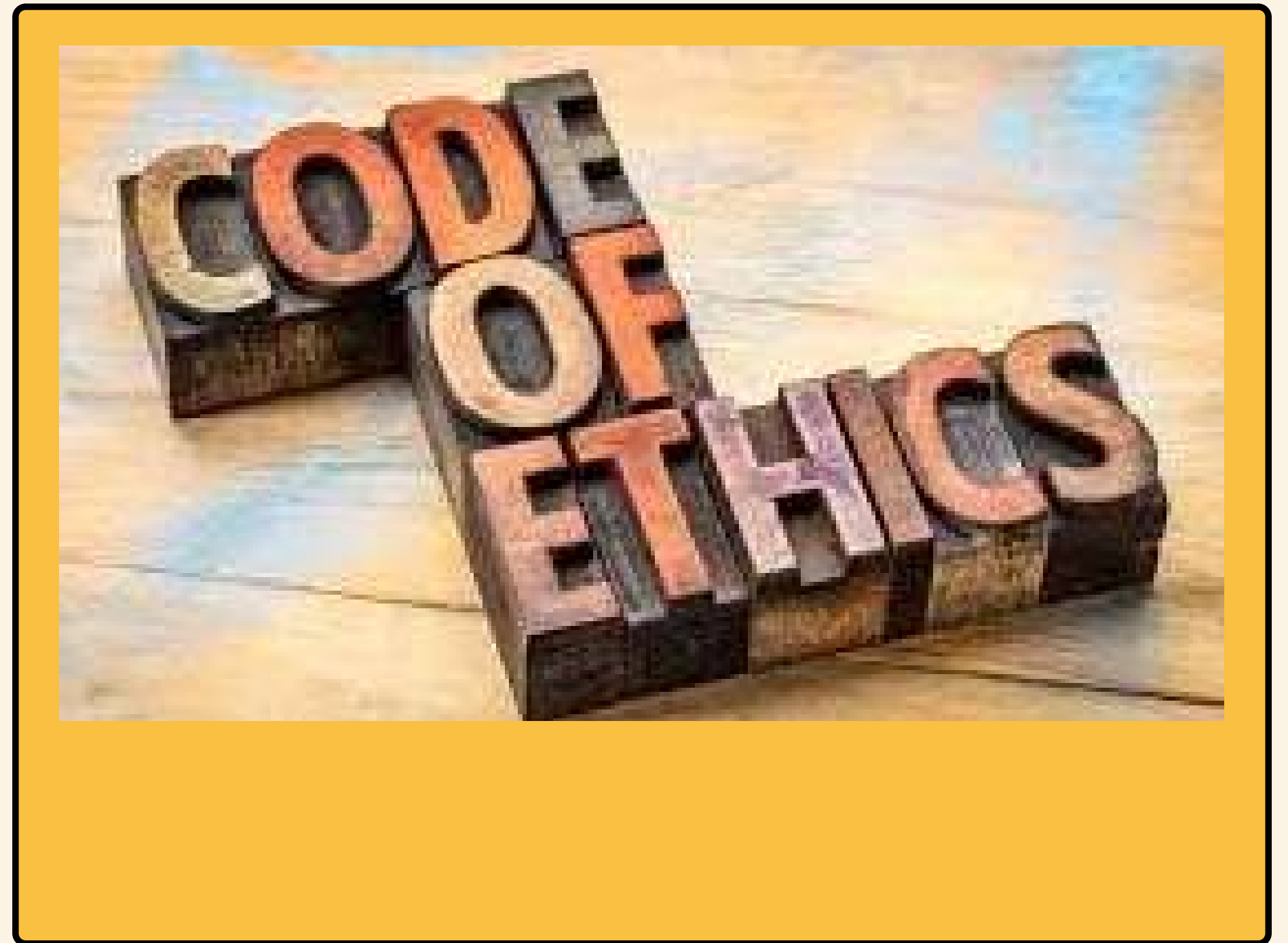
**AUTHORITATIVE
MEDIATOR**



**INDEPENDENT
MEDIATOR**

Kode Etik **MEDIATOR**

- Bentuk kontrol sosial terhadap para mediator.
- Menghubungkan nilai dan norma dengan suatu profesi.
- Mencegah campur tangan dari pihak eksternal yang merugikan.
- Mencegah munculnya masalah dan konflik.



SELF DETERMINATION

MEDIATOR WAJIB MENYELENGGARAKAN PROSES MEDIASI SESUAI DENGAN PRINSIP
PENENTUAN DIRI SENDIRI OLEH PARA PIHAK YANG BERSENGKETA

NETRAL

MEDIATOR WAJIB MEMELIHARA DAN MEMPERTAHANKAN KETIDAK BERPIHAKANNYA, BAIK DALAM WUJUD PERKATAAN, SIKAP DAN TINGKAH LAKU TERHADAP PARA PIHAK YANG TERLIBAT SENGKETA.

KONFLIK KEPENTINGAN

MEDIATOR DI DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA, HARUS BERITIKAD BAIK, TIDAK BERPIHAK DAN TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN PRIBADI SERTA TIDAK MENGORBANKAN KEPENTINGAN PARA PIHAK.

KERAHASIAAN

MEDIATOR WAJIB MENJAGA SEGALA KERAHASIAAN INFORMASI PARA PIHAK YANG TERUNGKAP DALAM PROSES MEDIASI DAN TIDAK BISA DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN



KUALITAS PROSES MEDIASI

MEDIATOR DILARANG MELAKUKAN PERTEMUAN SECARA RAHASIA KEPADA SALAH SATU PIHAK TANPA DIBERITAHUKAN TERLEBIH DAHULU KEPADA PIHAK YANG LAIN YANG BERSENGKETA

STUDI KASUS

- Bentuklah kelompok untuk mendiskusikan kasus yang ditentukan
- Download kasus melalui link disamping
- Setiap kelompok wajib menunjuk presenter



<https://bit.ly/diklatkades2023>



Terima
KASIH
